

ABSTRAK

Salna Juniarti Maulidina : “Akuntabilitas Publik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur”

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dan kewajiban yang diberikan oleh seluruh instansi yang ada dibawah naungan pemerintah. Tak terkecuali berlaku juga untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk memberikan segala jenis pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Akuntabilitas sendiri bisa berdampak baik apabila semua bentuk pertanggungjawaban bisa transparan dan akan memberikan stigma positif, akan tetapi fakta empiris mengatakan bahwa pada tahun 2021 target data administrasi kependudukan akta kematian hanya terealisasi sebesar 2% jauh dari target yang diharapkan sebesar 50%. Hal tersebut disebabkan karna kurangnya tingkat kesadaran masyarakat serta sosialisasi yang diberikan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur mengenai pentingnya hal tersebut. Oleh karena itu, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menemukan bagaimana penerapan akuntabilitas publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur.

Penelitian ini menggunakan teori tentang Akuntabilitas dari Mardiasmo: 2009, dengan empat dimensi yaitu *accounttibility for probity and legality* (Akuntabilitas kejujuran dan hukum), *process accountability* (Akuntabilitas proses), *program accountability* (Akuntabilitas program), dan *policy accountability* (Akuntabilitas kebijakan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SCianjur belum berjalan optimal. Hal ini bisa dilihat pada *accountability for fobity and legality* (Akuntabilitas kejujuran dan hukum) bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan sudah berjalan dengan aturan dan hukum yang belaku, kemudian pada atribut *process accountability* (Akuntabilitas proses) belum berjalan dengan optimal dan masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan meratanya pemberian pelayanan secara online. Pada atribut *program accountability* (Akuntabilitas program) keseluruhan program belum bisa berjalan efektif karna jarak akses kepada masyarakat dan kurangnya tingkat melek teknologi yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir ada atribut *policy accountability* (Akuntabilitas kebijakan) seluruh bentuk kebijakan yang dikeluarkan bisa dipertanggungjawabkan dituangkan di LKIJP dan bisa diakses dengan transparan dan bebas di website yang telah disediakan.

Kata kunci: Akuntabilitas Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur

ABSTRACT

Salna Juniarti Maulidina : "Public Accountability at the Cianjur Regency Population and Civil Registration Office"

Public accountability is a form of accountability and obligation given by all agencies under the auspices of the government. No exception also applies to the Cianjur Regency Population and Civil Registration Office to provide all types of accountability to parties who have interests. Accountability itself can have a good impact if all forms of accountability can be transparent and will provide positive stigma, but empirical facts say that in 2021 the target of death certificate population administration data is only realized by 2%, far from the expected target of 50%. This is due to the lack of public awareness and socialization provided by the Cianjur Regency Population and Civil Registration Office about the importance of this.

This study uses the theory of Accountability from Mardiasmo: 2009, with four dimensions, namely accountability for probity and legality, process accountability, program accountability, and policy accountability.

The results showed that public accountability carried out by the Cianjur Regency Population and Civil Registration Office had not run well. This can be seen in accountability for probity and legality that all activities carried out have run with strict rules and laws, then on the process accountability attribute has not run optimally and there are still people who do not know and evenly distribute online services. In the attributes of the accountability program, the entire program has not been able to run effectively due to the distance of access to the community and the lack of technological literacy in the community. And finally, there is the policy accountability attribute, all forms of policies issued can be accounted for, poured in LKIP, and can be accessed transparently and freely on the website that has been provided.

Keywords: Public Accountability, Population and Civil Registration Office of Cianjur Regency